

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota atau karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga (Mohamad Mahsun, 2012:25). Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan

dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai (Ira Halidayati, 2014). Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi, pembaharuan seluruh sistem, aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah, yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka kualitas pelaksanaan kerjanya harus ditingkatkan.

Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga masyarakat menuntut agar kinerja pemerintahan yang lebih baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan

Fenomena masalah kinerja instansi pemerintah daerah merupakan hal yang rutin terjadi. Seperti kasus Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terkait Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan nilai C terhadap kinerja Pemkab Bandung Barat. Penilaian itu berdasarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Raihan nilai tersebut menunjukkan masih kurangnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat akibat kinerja PNS-nya yang

rendah. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk bekerja lebih keras lagi guna mendapatkan nilai yang lebih baik di tahun mendatang. mulai dari kinerja pegawai, pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran sampai dengan evaluasi kegiatan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih memiliki kekurangan dalam melaksanakan program kegiatan di tahun anggaran. Kekurangan tersebut, mulai dari merumuskan tujuan, sasaran, merumuskan kunci keberhasilan, menentukan indikator untuk mencapai tujuan keberhasilan dan evaluasi kegiatan. Kelemahan lainnya terkait penentuan target program jangka pendek dan jangka panjang yang kaitannya dengan anggaran artinya bukan hanya melaksanakan program dan juga menghabiskan anggaran akan tetapi harus ada keberhasilan dan bukti nyata di tengah masyarakat setelah program itu dijalankan (<http://www.balebandung.com/kinerja-pemkab-bandung-barat-dinilai-buruk/>)

Fenomena lainnya yakni LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Jawa Barat meminta Bupati Bandung Barat Abubakar bertanggung jawab atas sepuluh Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai bermasalah. Kepala Bidang Investigasi LSM Penjara Jawa Barat, meminta Bupati Bandung Barat harus menindak anak buahnya di 10 SKPD yang dinilai bermasalah. Sejumlah SKPD tersebut, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Peranian, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, Badan Kependidikan Daerah, serta DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat. Disebutkan bahwa, masalah di Dinas Pendidikan diantaranya soal

tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan profesi guru dan tambahan penghasilan profesi yang disalurkan ke PNS SD yang tidak sesuai dengan kriteria pada 2014 lalu.

(<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/08/03/336882/10-skpd-dinilai-bermasalah>)

Berdasarkan fenomena di atas, dapat ditelaah bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih kurang memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kinerja individu dari para pegawai yang rendah. Kurangnya rasa tanggungjawab terhadap tugastugas mereka menyebabkan pegawai tidak cepat tanggap dalam menangani/melayani keluhan/kekhawatiran masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dalam peraturan perundang yang berlaku yang mencakup penerimaan. Penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP:2000 dalam Abdul Halim, 2012).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Auditya et al., (2013), Wiguna et al., (2015) dan Asrida (2012)

Wiguna, (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berkaitan erat terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang - undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Di pemerintah kota Bandung pun masih banyak ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan oleh BPK. Adapun temuan tersebut penyajian nilai piutang retribusi pemakanan sebesar RP. 2.260.711.000 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya, penatausahaan piutang pajak daerah tidak tertib saldo piutang sewa tanah dan bangunan sebesar Rp. 22.927.858.186 dan denda sewa tanah atau bangunan sebesar Rp. 5.328.064.007 belum menggambarkan keadaan sebenarnya. Saldo piutang lainnya per 31 desember 2014 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. Barang milik daerah minimal sebesar Rp. 1.237.920.000 berupa kendaraan dinas digunakan pegawai yang sudah tidak berhak, penyajian nilai

konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. 184.563.602.832 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya

<http://binpers.com/2015/11/16-temuan-bpk-ri-terkait-penggunaan-anggaran-pemkot-bandung/>

Fenomena diatas menunjukkan akuntabilitas kota bandung masih lemah atau tidak akuntabel karena banyak akun yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan

.Definisi dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Muhammad Gade (2000:95) adalah : Sistem akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

Menurut Abdul Halim (2012:35) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai berikut : “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Sedangkan menurut Halim dan Syam (2012:43) Sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Deti Mawar Sari (2016) dengan judul pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah Studi Kasus Pada Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung) dan Fika Meliani (2016) dengan judul pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap akuntabilitas keuangan (Survey Pada 12 Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya Pada Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Survey pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Bandung Raya)**

1.2 Rumusah Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka pemasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintahan Bandung Raya
2. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Pemerintahan Bandung Raya
3. Bagaimana Kinerja instansi pemerintahan Daerah pada Pemerintahan Bandung Raya
4. Bagaimana Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Pemerintahan Bandung Raya
5. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan Bandung Raya
6. Seberapa besar pengaruh kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan berdampak pada kinerja pemerintahan daerah Bandung Raya

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintahan Daerah Bandung Raya
2. Untuk menganalisis Akuntabilitas pengelolaan keuangan Di Pemerintahan Daerah Bandung Raya

3. Untuk menganalisis Kinerja instansi pemerintahan Daerah pada Pemerintahan Bandung Raya
4. Untuk menganalisis bagaimana Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Pemerintahan Bandung Raya
5. Untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan Bandung Raya
6. Untuk menganalisis Seberapa besar pengaruh Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan berdampak pada kinerja pemerintahan daerah Bandung Raya

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta referensi dalam penelitian bidang ekonomi khususnya akuntansi, terutama mengenai sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan secara teori maupun kondisi nyata di lapangan mengenai Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia akademis karena penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan atau referensi dalam kegiatan perkuliahan ataupun penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan gambaran bagi penelitian berikutnya yang membahas Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yang lebih baik

1.5 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Bandung Raya dan Waktu Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus sampai dengan selesai

